

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya UU No. 12 Tahun 2004 tentang Daerah dan UU No. 33 tentang Dana Perimbangan Daerah mendorong penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Wewenang yang diberikan pemerintah dari pusat ke daerah membawa konsekuensi koordinasi dan pengaturan untuk menyelaraskan pembangunan, baik nasional maupun daerah. Salah satunya adalah melalui pembangunan dari sektor pariwisata.

Sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Negara Indonesia akhir-akhir ini terus menerus melakukan, promosi pariwisata. Pembangunan pariwisata Indonesia adalah salah satu wujud pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata adalah salah satu upaya pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru membuka kesempatan usaha untuk mendorong perekonomian daerah dan melestarikan lingkungan serta mendorong segala potensi yang ada.

UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menimbang bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pada draft perkara UU tersebut merupakan gagasan yang selaras dengan konsep Agrowisata dimana asas yang bertujuan menjaga

kelestarian dan mutu lingkungan hidup, selain itu pada konsep agrowisata juga merupakan pariwisata yang memiliki ciri yang berkelanjutan karena pembangunan pariwisata pada agrowisata memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk dijadikan pariwisata yang mengedepankan kondisi alami dan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal. Salah satu tujuan dari pembangunan dari sektor pariwisata adalah: a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, c. Menghapus kemiskinan, d. mengatasi pengangguran, e. Melestarikan alam, f. lingkungan dan sumberdaya, g. memajukan kebudayaan, h. Mengangkat citra bangsa, i. Memupuk rasa cinta tanah air, j. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Pada tujuan UU pelestarian lingkungan merupakan bagian pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata salah satunya ialah melalui pengembangan ekonomi lokal.

Pengembangan ekonomi lokal adalah salah satu sektor pembangunan ekonomi yang optimal bagi sumber daya masyarakat. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang minim akan limbah dan eksternalisasi, hal ini yang sangat diharapkan dalam suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan banyak baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat dengan konsep *sustainable development*. Salah satu konsep pembangunan pariwisata dengan pengembangan ekonomi lokal adalah agrowisata. Agrowisata memiliki basis pada sumber daya alam dan lingkungan yang bertumpu pada perluasan pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. Agrowisata memiliki karakter pada pengelolaan yang didominasi kegiatan pertanian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah wisatawan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2011 sampai tahun 2014.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Datang Ke Indonesia Tahun 2011-2014

No	Tahun	Jumlah Wisatawan (Mancanegara)
1	2011	7.649.731
2	2012	8.044.462
3	2013	8.802.129
4	2014	9.435.411

Sumber Data : BPS 2015

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang tertarik datang ke Indonesia, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dari sektor industri pariwisata. Peningkatan yang terjadi dapat diindikasikan bahwa sektor industri pariwisata sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan, apalagi dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola dan pengawasannya. Jika industri pariwisata hanya dinikmati orang yang memiliki modal besar, kecil kemungkinan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pembangunan kepariwisataan meliputi 3 hal yakni industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata. Menurut Arief Yahya Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam (Pratama, et al 2017), menegaskan dalam lima tahun ke depan pemerintah menargetkan kunjungan bagi wisatawan asing sebesar 20 juta, dengan target 260 triliun yang diharapkan masuk devisa negara, Menurut menteri pariwisata Arief yahya. Pada tahun 2014 sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar 136 triliun, dan mampu menduduki peringkat ke 4 sebagai penyumbang devisa negara. Daya saing pariwisata di kawasan ASEAN Indonesia menduduki peringkat ke 4, masih di bawah Negara Singapura, Thailand dan Malaysia. Hal ini disebabkan karena adanya pengelolaan yang kurang seimbang dengan jumlah lokasi wisata yang ada di Negara Indonesia. Penguasaan lokasi wisata hanya dikelola para pihak yang memiliki modal besar. Serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Persoalan pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat diselesaikan dengan kelembagaan, karena Kelembagaan dianggap sebagai perubah dari luar dalam proses pembangunan, dengan demikian kelembagaan dianggap sebagai salah satu penyebab perubahan pembangunan (Daryanto 2004). Kelembagaan juga sebagai salah satu perubah dari dalam, yang berupa perubahan sistem sosial masyarakat. Selain itu pemberdayaan masyarakat dipedesaan sangat penting terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani, sehingga dibutuhkan upaya yang berorientasi secara ekonomi yang baik dan bijak.

Orientasi ekonomi sendiri ialah cara untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dan memperoleh tingkat kepuasan maksimal dengan tidak memperdulikan orang lain. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk memaksimalkan keuntungan materi pada dirinya sendiri, dan kurang memikirkan kesejahteraan orang lain. Dampak dari pola pikir yang berorientasi pada materi akan menumbuhkan masalah sosial dan kesenjangan ekonomi, antara masyarakat golongan atas dan masyarakat golongan bawah.

Masyarakat dengan modal sosial yang baik akan memberikan dukungan dalam pengembangan sosial ekonomi. Pengelolaan melalui modal sosial yang baik dan terstruktur melalui pemberdayaan masyarakat mampu menggerakkan roda perekonomian. Pengembangan kelembagaan pranata sosial ekonomi mutlak diperlukan dan pendesakan masyarakat guna mendukung pemenuhan modal sosial pembangunan. Faktor kelembagaan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang dianggap memungkinkan yakni dengan adanya pembagian kerja yang lebih jauh, peningkatan usaha, dan kebebasan dalam memperoleh peluang ekonomi (Daryanto 2004).

Modal sosial menurut Burt 1992 (dalam Wibisono, 2015) adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan asosiasi hubungan antara satu dengan yang lainnya yang dijadikan dalam kehidupan ekonomi dan aspek sosial. Kondisi yang demikian menjadi sebuah tantangan bagi daerah untuk menumbuhkan lagi modal sosial terutama pada kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah (*stakeholder*). Penguatan modal sosial salah satunya ialah melalui nilai budaya setempat, selain itu penguatan modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), gaya kepemimpinan, organisasi masyarakat yang lebih terbuka, manajemen sosial, struktur kesenjangan sosial, sistem hukum dan norma yang berlaku, dan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (Pranadji 2006).

Trust atau kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan modal sosial. Oleh karena itu modal sosial merupakan inti pembangunan. Rasa kepercayaan yang kurang memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan, serta permasalahan sosial yang dapat menurunkan kadar modal sosial dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi yang baik harus diimbangi pula dengan perubahan sosial, sehingga masalah sosial bisa dihindari, dan pembangunan ekonomi dapat berjalan. Kelembagaan hadir sebagai salah satu jalan untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks disebuah kelompok ataupun organisasi. Baik yang memiliki skala besar ataupun kecil, kelembagaan merupakan penyiap koordinasi masyarakat. ketidaksempurnaan informasi (asimetri) yang menyebabkan rasa ketidakpercayaan anggota dan pengurus menjadi tidak sejalan. Hal ini dapat berupa kebijakan ataupun peraturan baru yang disepakati, baik dari kesepakatan yang tertulis (formal) ataupun

kesepakatan perjanjian (informal) (Yustika, 2012). Selain itu kelembagaan tidak hanya membahas mengenai aktivitas individu antar anggota melainkan kegiatan dan aktivitas ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk pembangunan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat juga merupakan kesepakatan dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tercantum dalam Peraturan UU maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) , dan Rencana Pembangunan pendek (RPJPen) baik dari Negara maupun Daerah sampai institusi kecil. Sementara itu tujuan dari pembangunan ekonomi sesuai dengan spirit (semangat) Kabupaten Bojonegoro.

Spirit (semangat) utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bojonegoro tahun 2013-2018 adalah terwujudnya *Sustainable Development* pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agrowisata yang berorientasi pada konsep *Sustainable development* yang menjadi tujuan pembangunan daerah Bojonegoro, dengan enam pilar yakni *a. Pilar ekonomi, b. Pilar modal sosial, c. Pilar lingkungan hidup, d. Pemantapan Budgeting Non SDA, e. Terwujudnya Good and Clean Governance, f. Good leadership transformation.* Pembangunan pada enam pilar tersebut merupakan harapan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan memperhatikan kebijakan yang dapat meminimalisasi eksploitasi Sumber Daya Alam, dengan meningkatkan modal sosial masyarakat yang mampu berperan aktif dalam pembangunan di Bojonegoro.

Perkembangan jumlah pariwisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Objek Wisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun				
1	Jumlah Objek Wisata	2008	2009	2010	2011	2012
2	Wisata Alam	9	9	9	9	9
3	Wisata Budaya	4	4	4	4	4
4	Agrowisata	1	2	2	2	2
5	Jumlah Wisatawan	43.111	46.571	34.371	52.741	52.751

Sumber Data : (RPJM Kabupaten Bojonegoro 2013-2018)

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah wisatawan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan karena pemulihan sarana dan prasarana objek wisata bencana banjir yang ada di Bojonegoro. Pada jumlah objek wisata pada Agrowisata pada tahun 2008 merupakan peresmian Agrowisata belimbing yang ada di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu, dan pada tahun 2010 peresmian objek wisata Agrowisata Jambu yang berada di Desa Mayanggeneng, Kecamatan Kalitidu. Setelah peresmian tahun 2009 hingga tahun 2012 jumlah objek wisata yang ada tetap, dan akan bertambah yang berada di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas, merupakan Agrowisata Salak. Dari kedua Agrowisata tersebut yang dapat menarik dan paling diminati pengunjung adalah Agrowisata belimbing yang ada di Desa Ngringirejo. karena terstrukturnya pengelola, sarana, akses informasi dan promosi yang mudah diakses oleh kalangan masyarakat. Daya dukung Agrowisata Belimbing yang ada di Desa Ngringinrejo ialah kondisi yang alami dan sejuk dengan nuansa pedesaan yang masih asri, wisata petik Belimbing, cara belajar bercocok tanam belimbing, dan kualitas belimbing yang baik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi hal yang sangat penting bagi desa. Melalui Undang-Undang Desa, Negara memberikan pengakuan keberadaan desa. Undang-Undang ini memberikan wewenang Desa dalam mengelola keuangan, aset, perencanaan yang terintegrasi, dan demokratis. Mendukung adanya kemandirian Desa dalam memaksimalkan sumber daya alam. Perlu adanya sistem kolaborasi yang sejalan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kolaborasi menurut (Tajudin 2000) adalah para pihak untuk menghasilkan kepuasan bersama atas dasar “menang”, kerja sama antar stakeholder, kolaborasi merupakan konsep relasi antara organisasi, relasi antar pemerintah, aliansi strategis, *network* antar organisasi. Menurut Agrranof-Guide (dalam Raharja, 2010), Perspektif kerja sama antar stakeholder kolaborasi antara merupakan konsep relasi antar pemerintah, dan adapun faktor kolaborasi yang di kemukakan, ialah melalui kepercayaan (*trust*) dengan tujuan bersama saling tergantung antar individu, dan kelompok. Kepercayaan yang dibangun harus sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

Kondisi yang demikian berbanding terbalik di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kab. Bojonegoro dalam pengelolaan agrowisata masih banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya Pengelolaan agrowisata, agrowisata dikelola oleh petani yang bergabung di PokDarWis Belimbing, namun dari 2123 jiwa jumlah penduduk desa ngringinrejo hanya 104 yang tergabung dalam PokDarWis dengan luas lahan garap 20 hektar. Jika dipresentasikan hanya 9,4% adalah penduduk yang mengelola agrowisata belimbing, dimana 52% sebagai pemilik lahan, 19% sebagai pembudidaya belimbing, dan 18% sebagai penjual belimbing.

Pengelola tersebut juga didominasi oleh anggota PokDarWis hal ini belum sepenuhnya masyarakat desa menanam tanaman belimbing. Pembangunan kawasan agrowisata belimbing tersebut dikuasai anggota PokDarWis. Selain itu Peran pemuda sebagai salah satu generasi yang memiliki jiwa muda dalam memberikan inovasi bagi agrowisata juga belum dilibatkan. Peran Pemerintah Desa dalam mengembangkan inovasi dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan agrowisata belimbing juga belum optimal. Padahal peran pemerintah desa tersebut khususnya Kepala Desa tidak hanya sebagai pendamping, akan tetapi sebagai pemimpin yang mampu memberikan pengaruh sosial kepada masyarakatnya. Berbagai persoalan tersebut mengenai persoalan peraturan/aturan main yang belum jelas, sehingga para “penguasa” memiliki kepentingan yang tidak berpihak pada pemilik lahan (petani belimbing). Dengan demikian persoalan-persoalan tersebut memiliki kedekatan dengan persoalan yang ada dalam tata kelola kelembagaan yang harus segera diselesaikan pada Agrowisata belimbing Desa Ngringinrejo, Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas dapat di temukan Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan pada Agrowisata belimbing, Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tata kelola kelembagaan pada Agrowisata gabungan belimbing, Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Permasalahan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan pada Agrowisata belimbing, Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tata kelola kelembagaan pada Agrowisata belimbing, Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mengambil berbagai manfaat diantaranya :

1. Manfaat teoritik : bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan atau ilmu mengenai ekonomi kelembagaan secara makro dan mikro.
2. Manfaat secara praktis : penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan pemerintah Desa, khususnya bagi daerah yang akan melakukan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat melalui kelembagaan.